

Paradigma Manajemen Pendidikan Islam (Antara Idealita dan Realita)

* Tiwi Amalia, Umi Kalsum, Winda, Yuli Astuti, Ikramatun Ni'mah
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Jami Banjarmasin.

Abstract

Received: December 1, 2024
Revised: December 15, 2024
Accepted: January 3, 2025

The paradigm of Islamic education management is a concept that continues to evolve along with the dynamics of social, cultural, and technological changes. Ideally, Islamic education management is expected to create a system based on Islamic values, reflect the leadership principles of Prophet Muhammad, and be able to respond to contemporary challenges. However, in reality, various obstacles are still encountered, such as a lack of competent human resources, limited facilities, and the challenges of globalization, which demand Islamic education to be more adaptive and innovative. This article aims to analyze the gap between ideality and reality in Islamic education management and propose strategic solutions to enhance the effectiveness of the Islamic education system in the modern era.

Keywords:

Islamic Education Management, Ideality, Reality, Paradigm, Challenges, Solutions.

Abstrak

Paradigma manajemen pendidikan Islam merupakan suatu konsep yang terus berkembang seiring dengan dinamika perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Dalam idealitasnya, manajemen pendidikan Islam diharapkan mampu menciptakan sistem yang berlandaskan nilai-nilai Islam, mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, serta mampu menjawab tantangan zaman. Namun, dalam realitasnya, berbagai kendala masih dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan fasilitas, serta tantangan globalisasi yang menuntut pendidikan Islam untuk lebih adaptif dan inovatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara idealita dan realita dalam manajemen pendidikan Islam serta menawarkan solusi strategis guna meningkatkan efektivitas sistem pendidikan Islam di era modern.

Kata kunci:

Manajemen Pendidikan Islam, Idealita, Realita, Paradigma, Tantangan, Solusi.

(*) Corresponding Author:

tiwiamalia265@gmail.com

PENDAHULUAN

Manajemen Pendidikan Islam (MPI) adalah disiplin ilmu yang memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam konteks pendidikan Islam. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam dapat beroperasi secara efektif dan efisien sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara konsep ideal manajemen pendidikan Islam dan realitas yang dihadapi di lapangan. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, tantangan struktural, dan kebijakan yang tidak konsisten.

Beberapa penelitian telah menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi kesenjangan ini. Misalnya, dalam artikel "Eksistensi dan Paradigma Keilmuan Manajemen Pendidikan Islam" yang diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Tambusai, dibahas bagaimana paradigma keilmuan MPI menekankan praktik manajemen yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh lembaga pendidikan Islam, seperti transparansi dan integritas. (Jongcik, et al., 2023)

Islamic Knowledge and Pedagogical Perspectives

Volume 1 Number 1 Januari (2025), ISSN: XXXX-XXXX

Selain itu buku “Paradigma Manajemen Pendidikan Islam” karya Prof. Dr. Mujamil Qamar, M. Ag. , menawarkan empat paradigma dalam MPI, yaitu paradigma tauhid, integralistik, transformatif, dan pengembangan. Masing-masing paradigma ini dijelaskan secara mendalam memberikan wawasan tentang bagaimana manajemen pendidikan islam dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip islam.(Qomar, 2021)

Namun, dalam Implementasinya, sering kali terdapat kesenjangan antara idealita dan realita yang dihadapi oleh institusi pendidikan islam. Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin dalam artikelnya “Pendidikan Islam: Antara Realitas dan Cita-cita” menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mencapai cita-cita pendidikan islam ditengah realitas yang ada.(Zainuddin, 2020) Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai perbedaan antara konsep ideal manajemen pendidikan islam dan realitas yang terjadi dilapangan. Pendekatan penelitian kepustakaan (library research) menjadi relevan untuk mengkaji berbagai literatur, baik dari buku maupun jurnal, guna memahami faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut dan mencari solusi yang tepat.

Lebih lanjut, buku “Kajian Filsafat Manajemen Pendidikan Islam: Parodaks daan Teori” membahas parodaks yang muncul dalam manajemen pendidikan islam, dimana terdapat konflik antara teori dan praktik,serta antara idealisme dan realitas yang dihadapi oleh para pemimpin pendidikan. Buku ini menyoroti pentingnya menyesuaikan prinsip filosofis dengan kebutuhan kehidupan nyata dalam manajemen pendidikan uislam dan mengusulkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek teknis, moral, spiritual, dan sosial. (Didi, et al., 2024)

Shohib Hasan dalam penelitiannya “Tantangan dan Strategi Manajemen Pendidikan Islam dalam Menghadapi Era Disrupsi” mengidentifikasi tantagan utama seperti adaptasi teknologi, relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, dan keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengikuti perubahan zaman. Untuk mengatasi hal ini,ia menyarankan penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berbasis teknologi, pembaruan kurikulum yang sesuai dengan industri 4.0, serta integrasi nilai-nilai islam dalam pengembangan karakter pesertadidik.(Hasan, 2023)

Nurul Hidayah, Ahmad Ridwan, dan Abdul Azis dalam artikel “Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Manajemen Pendidikan Islam di Era Modern” menyoroti tantangan seperti perkembangan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, Ketidaksesuaian kurikulum, masalah pendanaan, dan kurangnya kolaborasi dengan pihak luar. Mereka mengusulkan solusi seperti pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, pengembangan SDM pendidik, reformasi kurikulum, optimalisasi pendanaan, dan peningkatan kolaborasi antar lembaga untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan islam.(Hidayah, et al., 2022)

Masalah pengolahan pendidikan Islam yang kini difokuskan adalah membuat terobosan dan mengujicobakan hasil berbagai kajian dan penelitian sambil menemukan alternative solusi dan paradigma dalam meningkatkan mutu kelembagaan dan SDM. Lembaga-lembaga pendidikan Islam dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sudah lama melaksanakan manajemen secara alami dan konvensional, masih banyak aspek yang perlu dikaji untuk memenuhi apa yang disebut TQM (Total Quality Management.² Disi lain peningkatan mutu SDM sebagai pengelola lembaga Pendidikan Islam pun sudah banyak dilaksanakan baik melalui jenjang pendidikan, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang cukup besar menghabiskan biaya dengan harapan agar dapat mendongkrak kinerja yang lebih bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Banyak pilihan sebenarnya terhadap manajemen Pendidikan Islam saat ini yang telah dilaksanakan. Di lingkungan Madrasah saja, baik Manajemen Mutu Terpadu (MMT), Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), atau manajemen perubahan madrasah menuju kearah pemberdayaan personil dan potensi madrasah untuk mencapai keunggulan kompetitif dan keunggulan

komparatif antara satu madrasah dengan madrasah lain telah lama dilaksanakan. Tetapi hasilnya masih terus dipantau, dikaji, dan diteliti kembali.

LANDASAN TEORI

A. Paradigma Baru Manajemen Pendidikan

Tuntutan terhadap lulusan dan layanan lembaga pendidikan yang bermutu semakin mendesak karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan kerja. Salah satu implikasi globalisasi dalam pendidikan yaitu adanya deregulasi yang memungkinkan peluang lembaga pendidikan asing membuka sekolahnya di Indonesia.

Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi lembaga pendidikan kecuali hanya mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik dan layanan lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan. Untuk mencapai terselenggaranya pendidikan bermutu, dikenal dengan paradigma baru manajemen pendidikan yang difokuskan pada otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Keempat pilar manajemen ini diharapkan pada akhirnya mampu menghasilkan pendidikan bermutu. (Wirakartakusumah, 1998)

1. Mutu

Mutu adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara dimana setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Secara luas mutu dapat diartikan sebagai agregat karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan. Karakteristik mutu dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan proses dan hasil belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan.

2. Otonomi

Pengertian otonomi dalam pendidikan belum sepenuhnya mendapatkan kesepakatan pengertian dan implementasinya. Tetapi paling tidak, dapat dimengerti sebagai bentuk pendelegasian kewenangan seperti dalam penerimaan dan pengelolaan peserta didik dan staf pengajar/staf non akademik, pengembangan kurikulum dan materi ajar, serta penentuan standar akademik.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan output dan outcome yang memuaskan pelanggan. Akuntabilitas menuntut kesepadanan antara tujuan lembaga pendidikan tersebut dengan kenyataan dalam hal norma, etika dan nilai (values) termasuk semua program dan kegiatan yang dilaksanakannya.

4. Akreditasi

Akreditasi merupakan suatu pengendalian dari luar melalui proses evaluasi tentang pengembangan mutu lembaga pendidikan tersebut. Hasil akreditasi tersebut perlu diketahui oleh masyarakat yang menunjukkan posisi lembaga pendidikan yang bersangkutan dalam menghasilkan produk atau jasa yang bermutu. Pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh suatu badan independen yang berwenang.

5. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu upaya sistematis untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang menghasilkan kesimpulan tentang nilai, manfaat, serta kinerja dari lembaga pendidikan atau unit kerja yang dievaluasi, kemudian menggunakan hasil evaluasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Evaluasi bisa dilakukan secara internal atau eksternal. Suatu evaluasi akan lebih bermanfaat bila dilakukan secara berkesinambungan. Salah satu evaluasi terpenting dalam pendidikan adalah evaluasi diri (self evaluation) yang dilakukan bertahap dan terus menerus atas seluruh komponen-komponen pendidikan.

Paradigma pendidikan islam merupakan kerangka berfikir yang mendasari proses pensisipan dalam islam, mencakup aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologis, pendidikan islam tidak hanya berfokus pada realitas fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan metafisik. Epistemologinya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama ilmu pengetahuan, sementara aksiologinya menekankan nilai-nilai moral dan ketuhanan dalam proses pendidikan.(Wardi, 2014)

Tujuan utama pendidikan islam adalah membentuk individu yang seimbang antara aspek jasmani dan rohani, serta mampu mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup pengembangan akal, hati, ruhani, dan jasmani secara harmonis.(Khojir, 2011)

B. Manajemen Pendidikan Islam

1. Pengertian Manajemen Pendidikan

Manajemen merupakan terjemahan secara langsung dari kata manajemen yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata pimpinan.(Ramayulis, 2004) Manajemen berakar dari katakerja *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, atau mengelola.(John M. Echlos, 1993) Pengertian yang sama dengan pengertian dan hakikat manajemen adalah *al-tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang dapat kita temukan dalam al-Qur'an: Q.S. 32:5 dan Q.S 10:31. Yang artinya "Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu" (Q.S.As-Sajadah [32]:05). Pada prinsipnya makna diatas , terdapat kata *Yudabbiru alamra* yang berarti mengatur urusan. Ahmad al-Syawi menafsirkan bahwa Allah adalah pengatur alam (manager) karena manusia yang diciptakan-Nya telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

James H Donnelu, mendefinisikan: Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan oleh suatu orang/lebih untuk mengatur kegiatan-kegiatan melalui orang lain sebagai upaya untuk mencapai tujuan.(James H., 1984) Selanjutnya Kadarman dan Yusuf, (1996: 10), mendefinisikan manajemen adalah suatu rentetan langkah yang terpadu yang mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu system yang bersifat sosial ekonomi-teknik. Sementara Sondang P.Siagian menyatakan bahwa manajemen adalah kemampuan/keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.(Yusuf Udaya, 1996)

George R.Terry (1973) dalam bukunya *The Principles of Management* mengemukakan bahwa manajemen merupakan "sebuah kegiatan", pelaksanaannya disebut *managing* dan orang yang melakukannya disbut *manager*. Individu yang menjadi manajer bertugas menangani tugas tugas baru yang seluruhnya bersifat managerial yang penting diantaranya ialah menghentikan kecendrungan untuk melaksanakan segala sesuatunya seorang diri saja.(Syarifudin, M. Pd, 2005) Selanjutnya Syarifudin (2005: menegaskan bahwa; "Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dengan fungsi dasar dan proses manajemennya adalah *planning, organizing, actuating* dan *controlling*". Semuanya dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya.(Syafaruddin, 2005)

Manajemen dapat kita lihat sebagai sebuah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui orang lain dan bekerjasama dengannya. Proses itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif, efisien, dan produktif. Sedangkan, Pendidikan Islam merupakan proses trans-internalisasi nilai-nilai islman kepada peserta didik sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Manajemen Pendidikan islam dapat di definisikan sebagai proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki (umat Islam, lembaga pendidikan/lainnya) baik perangkat keras maupun lunak, pemanfaatan tersebut melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien,

dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Prinsip dan Aspek Manajemen Pendidikan Islami

Dalam kitab *Fi Ijtamiyyab al-Tarbiyah*, karya Munir al-Husry. Sarhan (1978:69-71), disebutkan bahwa prinsip manajemen Islami itu diantaranya ; (1) Ikhlas; (2) Kejujuran; (3) Amanah; (4) Adil; (5) Tanggung Jawab; (6) Dinamis; (7) Praktis; dan (8) Fleksibel. Sementara Sanusi Uwes menambahkan ada beberapa karakter kepemimpinan Islam yang mengantarkan kepada kesuksesan kepemimpinan Rasulullah SAW., yakni (1) kejujuran, (2) keadilan, (3) kelembutan hati, (4) kecerdasan, (5) keberanian, dan (6) sabar.(Uwes, 2003)

Dalam aplikasinya, peranan manajemen sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi manajemen, dimana fungsi-fungsi inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari manajemen itu sendiri sebagai proses yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi. Fungsi-fungsi ini pula nantinya yang akan menentukan berhasil dan tidaknya kinerja manajemen. Berikut uraian fungsi-fungsi manajemen, yaitu: (1) Perencanaan (Planning); (2) Pengorganisasian (Organizing); (3) Pengerakan (actuating) dan (4) Pengawasan (controlling).(Walter M., 2004) Secara garis besar aspek manajemen pendidikan Islam adalah manajemen yang mengacu pada aspek ; (1) institusi (lembaga), (2) structural (3) personalia (4) informasi, (5) teknik, dan (6) lingkungan/masyarakatnya.(Made, 1982)

3. Manajemen Model Pembelajaran Efektif dan Unggulan

Pembelajaran efektif dan unggulan merupakan satu konsep yang memiliki cakupan yang luas, dan digunakan dalam banyak hal, sebagaimana dikemukakan para pakar manajemen pendidikan, Smith SM., bahwa pembelajaran merupakan suatu hasil, fungsi, dan proses. Bila pembelajaran itu digunakan sebagai suatu proses. Maka suatu percobaan dilakukan untuk menerapkan apa yang terjadi bila suatu pengalaman belajar berlangsung. Untuk itu tidaklah salah bila pembelajaran ini diartikan sebagai proses interaksi edukatif antara dua pihak (peserta didik dan pendidik) guna perubahan, pembentukan dan pengendalian perilaku agar mencapai lulusan yang *marketable*. pembelajaran diartikan sebagai suatu proses pendidikan yang dapat memberikan hasil jika orang-orang berinteraksi dengan informasi (materi, kegiatan, pengalaman). Untuk itu makna pembelajaran adalah: (1) Upaya mengorganisasikan lingkungan belajar yang kondusif; (2) mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik; dan (3) Suatu proses membantu menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari.(Umedi, 1999) Maka ini menjelaskan bahwa seseorang akan menjadi warga masyarakat yang baik, jika ia dapat menyumbangkan dirinya bagi kehidupan yang baik melalui proses, hasil dan fungsi pembelajaran.

Model manajemen yang ditawarkan para ahli ini diantaranya:

a. Model Manajemen Berdasarkan Sasaran (Management by Objective)

Model manajemen ini merupakan aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan menjadi satu kesatuan berdasarkan sasaran/tujuan-tujuan yang ingin dicapai, mulai dari tujuan nasional hingga beberapa sasaran sesuai dengan sifat dan jenjang Lembaga pendidikan yang bersangkutan. Menurut Giegold (1988:2), Manajemen berdasarkan sasaran ini, prioritas utamanya merumuskan tujuan lembaga pendidikan, kemudian dijabarkan menjadi sub fungsi, kemudian menjadi unit kerja dan setiap unit kerja dijabarkan menjadi tugas-tugas individu. Dari contoh tersebut nampak model ini lebih mengutamakan rumusan tujuan secara teoritis yang kurang dapat dipraktikkan karena membatasi kreativitas guru disekolah.

b. Manajemen Berdasarkan Struktur (Management by Structures)

Menurut Dale, bahwa model manajemen ini lebih bersifat mekanistik dalam mengatur organisasi. Model manajemen ini mengatur pola organisasi dan memperjelas apa yang harus dikerjakan oleh setiap personalia organisasi dan mengatur hubungan antara pekerja kemudian digabung di bawah satu ketua. (Hahnson, et.al, 1983) Jhonson menyatakan: Manajemen berdasarkan struktur ini lebih menekankan pada pengaturan hubungan beberapa pekerjaan yang sama menjadi unit-unit kerja yang secara hierarkis dalam organisasi pendidikan, tetapi tidak menyentuh proses pendidikan. Contoh model manajemen ini lebih bersifat sentralistik, mekanistik dan tidak komprehensif.

c. Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management)

MBS merupakan kependekan dari Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu model pendekatan baru yang kemudian berkembang dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah atau dalam nuansa yang lebih bersifat pengembangan (devolepment) disebut "*School Based Quakity Improvement*". Model manajemen ini, merupakan alternatif dalam pengolahan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Konsepnya diperkenalkan melalui teori "*Effective School*" oleh Edmon pada tahun 1979, sasarannya lebih memfokuskan pada perbaikan proses pendidikan. Keunggulannya antara lain: (1) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (2) sekolah mempunyai misi dan target mutu yang ingin dicapai, (3) sekolah mempunyai kepemimpinan yang kuat, (4) adanya harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi, (5) adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai dengan tuntutan IPTEK, (6) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administrasi dan pemanfaatan hasil untuk penyempurnaan/perbaikan mutu dan (7) adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat. (Umaedi, 1999: 5)

Djaman Satotori (2001: 1), menegaskan bahwa: pengembangan konsep manajemen ini didesain untuk meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola perubahan Pendidikan secara menyeluruh mencakup kebijakan, strategi perencanaan, pengembangan isi kurikulum hasil inisiatif sendiri berdasarkan ketentuan pemerintah dan otoritas pendidikan. Proses pendidikan ini menuntut adanya perubahan sikap tingkah laku seluruh komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya, termasuk orang tua dan masyarakat.

Umaedi, menegaskan, paling tidak ada empat hal yang terkait dalam peningkatan mutu pendidikan, yaitu: (1) Perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus menerus mengumandangkan peningkatan mutu, (2) kualitas mutu harus ditentukan oleh penguasa jasa sekolah, (3) prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi dan misi sekolah bukan dengan pemaksaan aturan, dan (4) sekolah harus menghasilkan sekolah yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap arif bijaksana, karakter dan memiliki kematangan semisinal. (Umedi, 1999)

d. Manajemen Berbasis Sekolah Madrasah (Madrasah Based Management)

MBM (Manajemen Berbasis Madrasah) merupakan strategi untuk mewujudkan madrasah yang efektif dan produktif. MBM merupakan paradigma baru manajemen pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada madrasah, dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi ini diberikan agar madrasah leluasa mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya

sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Dalam rangka peningkatan efisiensi mutu dan pemerataan pendidikan. (Mulyasa E, 2003) Penekanan aspek-aspek tersebut sifatnya situasional dan kondisional sesuai dengan masalah yang dihadapi dan politik yang dianut pemerintah.

Nanang Fatah, menjelaskan bahwa: MBM merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada madrasah untuk mengatur kehidupan sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhannya. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi madrasah untuk meningkatkan kinerja para tenaga kependidikan, menawarkan partisipasi langsung kelompokkelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Dengan penerapan MBM, madrasah memiliki “*full authority and responsibility*” dalam menetapkan programprogram pendidikan dan berbagai kebijakan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Pendidikan. (Fatah, 2000)

C. Operasionalisasi Manajemen Pendidikan Islami Pada Institusi

Operasionalisasi manajemen pendidikan Islami melibatkan lima pendekatan strategis dalam pengembangan madrasah menurut M. Syarifudin, yaitu: pendekatan berdasarkan struktur, proses, fungsi, pembagian kerja, dan gaya kepemimpinan manajerial. Berbagai model manajemen seperti MBM, MBS, MBO, MIS, dan manajemen konvensional telah diterapkan, namun hasilnya masih memerlukan penelitian lebih lanjut. (Syarifudin, M. Pd, 2005)

1. Pendekatan Berdasarkan Struktur: Pendekatan ini fokus pada organisasi yang mencakup sistem, termasuk organisasi pendidikan, dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi untuk mencapai efektivitas dan produktivitas dalam operasionalnya.
2. Pendekatan Berdasarkan Proses: Pendekatan ini melibatkan sepuluh langkah, mulai dari penentuan tujuan dan sasaran, perumusan strategi, hingga kegiatan pengorganisasian dan penggerakan tenaga pelaksana.
3. Pendekatan Berdasarkan Fungsi: Pendekatan ini menilai efisiensi dan efektivitas kerja berdasarkan “kepuasan” sebagai ukuran utama, dengan mutu sebagai kriteria utamanya. Dalam manajemen pendidikan, fungsi pemberian jasa didasarkan pada fungsi pengaturan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga, masing-masing dengan peran pelayanan dan pengaturan.
4. Pendekatan Berdasarkan Pembagian Kerja: Pembagian kerja dalam manajemen dilakukan berdasarkan tiga kriteria: fungsi, spesialisasi, dan wilayah kerja.
5. Pendekatan Berdasarkan Gaya Kepemimpinan (Manajerial): Kepemimpinan memainkan peran krusial dalam manajemen untuk mencapai tujuan. Peningkatan mutu kepemimpinan diperlukan, terutama untuk meningkatkan kemampuan para pejabat dalam manajemen pendidikan.

Secara keseluruhan, kelima pendekatan ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan Islam perlu dievaluasi, termasuk kelembagaan, sumber daya manusia, dan prospeknya di masa depan.

D. Analisis Manajemen

Ilmu manajemen berkembang seiring dengan munculnya berbagai organisasi dalam masyarakat. Menurut Syarifudin, manajemen bertujuan untuk mengelola kegiatan pendidikan guna memenuhi kebutuhan masa depan bersama. Perilaku kerjasama didasarkan pada prinsip tauhid, khalifah, dan amanah. Sopyan Syafri Harahap menyatakan bahwa manajemen Islam adalah ilmu manajemen yang menyeluruh, konsisten, dan berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Manajemen pendidikan Islami mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam mengelola organisasi pendidikan (seperti madrasah, sekolah, pesantren) untuk kebaikan dan kemajuan umat. (Syafaruddin, 2005)

Islamic Knowledge and Pedagogical Perspectives

Volume 1 Number 1 Januari (2025), ISSN: XXXX-XXXX

Perencanaan Pendidikan Islami Dalam Islam, perencanaan adalah hal yang penting, karena pikiran agama dibangun atas dasar perencanaan untuk masa depan. Taufik Rahman menyatakan bahwa perencanaan pendidikan yang bermanfaat dan metode pengajaran yang tepat dapat membawa seseorang kepada tujuan hidup, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Merencanakan pendidikan merupakan langkah awal yang mengakui bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada usaha sendiri, tetapi juga pada faktor lain yang perlu dipersiapkan. (Rahman, 1999)

Dalam al-Qur'an, Al-Faruqi menjelaskan bahwa umat Islam sebagai khalifah memiliki tanggung jawab terhadap kemakmuran alam dengan dua tujuan perencanaan: (1) meraih kebahagiaan hidup di dunia, dan (2) meraih kebahagiaan di akhirat (Q.S. Al-Baqarah, 2: 201). (Al-Faruqi, 2012) Perencanaan ini harus mempertimbangkan dimensi dunia dan akhirat. Proses perencanaan memerlukan keputusan bersama, dengan persiapan sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan bersama di berbagai bidang kehidupan (Q.S. Yusuf, 12:47-49). Kisah Nabi Yusuf dalam al-Qur'an (Q.S. Yusuf, 12:47-49) mengajarkan pentingnya perencanaan jangka panjang untuk menghadapi masa depan, seperti perencanaan pangan menghadapi tahun-tahun sulit. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi setiap Muslim tentang perlunya merencanakan tindakan untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan.

Dalam konsep perencanaan, terdapat unsur tawakkal sebagai refleksi dari keyakinan tauhid kepada Allah. Menurut Qardhawi, pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun harus diiringi dengan tawakkal sebagai bagian dari perencanaan dan pelaksanaan yang baik untuk meraih keridhaan Allah. (Qardhawi, 1997) Namun, dalam kenyataannya, banyak lembaga pendidikan berlabel Islam yang masih kurang memiliki perencanaan yang matang. Perencanaan madrasah yang memanfaatkan manajemen berbasis keislaman, kemodernan, dan Keindonesiaan, seperti MBM, MBS, atau MBO, masih belum sepenuhnya diterapkan secara efektif. Perencanaan pendidikan yang baik memerlukan kajian dan penelitian untuk meningkatkan mutu perencanaan, seperti MBM (Manajemen Berbasis Madrasah), yang bertujuan untuk pemberdayaan lembaga dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Perencanaan operasional yang terukur harus dapat diterapkan di tingkat pelaksanaan pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran di lembaga pendidikan Islam, perencanaan yang baik melibatkan guru dalam membuat keputusan tentang isi pelajaran, durasi waktu pengajaran, jenis penilaian, dan cara penilaian. (Mukhtar, dkk, 2003) Sebagai manajer, guru bertanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, memotivasi, memanfaatkan sumber daya, serta mengawasi dan menilai hasil pembelajaran.

Secara operasional, perencanaan pengajaran bisa meliputi: *Pertama* Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP/silabi) menjadi Analisis Mata Pelajaran (AMP). *Kedua* Menghitung hari kerja efektif untuk setiap mata pelajaran, memperhitungkan hari libur dan hari untuk ulangan. *Ketiga* Menyusun program tahunan (prota) dan program semester/caturwulan. *Keempat* Menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP), yang mencakup rincian pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan tes formatif. *Kelima* Menyusun rencana pengajaran dengan mencatat kemajuan siswa, yang akan menjadi dasar untuk evaluasi rancangan program (ERP) berikutnya. (Syafaruddin, 2005) Kegiatan perencanaan kurikulum, mulai dari AMP (Analisis Mata Pelajaran) hingga Rencana Pengajaran (RP), sangat penting untuk kelangsungan kegiatan pembelajaran. Peran kepala sekolah, madrasah, dan pesantren sangat vital dalam membimbing, mengarahkan, dan membantu guru yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kegiatan perencanaan ini. Untuk mempermudah kelancaran kegiatan perencanaan, dapat dilakukan kegiatan bersama antar guru dalam mata pelajaran sejenis melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Islamic Knowledge and Pedagogical Perspectives

Volume 1 Number 1 Januari (2025), ISSN: XXXX-XXXX

Pengorganisasian pendidikan Islam bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia guna mencapai tujuan pendidikan Islami melalui pelaksanaan rencana yang telah disusun. Dalam organisasi pendidikan Islam, terdapat pembagian tugas yang menciptakan pemimpin dan anggota. Pemimpin, dengan otoritas dan keteladanannya, mempengaruhi anggota untuk bekerja sama dan mencapai tujuan secara sukarela. Menurut Rahman, amanah harus diberikan kepada individu yang memiliki kompetensi intelektual dan manajerial, karena profesionalisme sangat dihargai dalam Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Isra (17:84), yang menyatakan bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan kemampuannya, dan Allah lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dalam konteks pengorganisasian, salah satu aspek penting adalah manajemen kurikulum, yang bertujuan untuk mengarahkan proses pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pengajaran. Manajemen kurikulum di lembaga pendidikan mencakup perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi/pengawasan. Proses manajerial ini melibatkan kolaborasi antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru untuk memastikan perencanaan berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. (Rahman, 1999)

Kepemimpinan dalam konteks pendidikan Islam mengandung makna yang mendalam dan terkait erat dengan konsep khalifah, imam, dan wali. Dalam bahasa Inggris, kepemimpinan disebut "leadership" (Rahman, 1999). Secara filosofis, dalam pandangan al-Maragi, seorang khalifah adalah pelaksana wewenang Allah dalam menjalankan perintah-Nya dalam kehidupan sosial. Imam, yang berarti pemimpin, adalah seseorang yang memimpin umat di jalan yang lurus, seperti yang digambarkan dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Qashash 28:5: "Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan menjadikan mereka pemimpin serta mewarisi bumi." Dalam Islam, pemimpin juga diartikan sebagai wali, yaitu pelindung dan pengayom umatnya. Pemimpin idealnya bertugas untuk membimbing umatnya agar terhindar dari kesesatan dan kemelaratan. Sifat-sifat pemimpin yang baik bisa dicontohkan dari Rasulullah SAW, yang dalam kepemimpinannya selalu menunjukkan kelembutan, kasih sayang, dan kebijaksanaan.

Terkait dengan hakikat dan ciri-ciri manajemen Islami, Effendy menjelaskan bahwa ada enam ciri utama, di antaranya: Manajemen berdasarkan akhlak yang luhur (akhlakul Karimah) - Mengedepankan etika dan moralitas dalam setiap tindakan dan keputusan. Manajemen terbuka - Artinya, pengelolaan yang sehat, terbuka, dan transparan. Pemimpin atau manajer harus mengelola amanahnya dengan adil dan menjaga transparansi dalam setiap aspek kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Manajemen yang demokratis - Konsekuensi dari sikap terbuka dalam manajemen adalah pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah untuk kebaikan organisasi. Dalam manajemen yang demokratis, anggota diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Manajemen berdasarkan ilmiah mengharuskan pimpinan dan manajer memiliki pengetahuan yang luas tentang organisasi, manajemen, dan bidang pekerjaannya, agar dapat merencanakan, mengarahkan, mengambil keputusan, dan mengawasi pekerjaan dengan tepat. Manajemen berdasarkan tolong menolong (ta'awun) mengamalkan prinsip kerjasama sebagai bagian dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan Allah. Manajemen berdasarkan perdamaian mengacu pada nilai-nilai yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan model kepemimpinan Rasulullah SAW, seperti kejujuran, keadilan, kelembutan hati, kecerdasan, keberanian, dan kesabaran. Implementasi manajemen pendidikan Islam yang modern memerlukan pimpinan ideal dengan pengetahuan manajemen pendidikan Islami, keterampilan dalam perencanaan dan pengelolaan, serta sikap yang demokratis, kreatif, terbuka, dan mampu melaksanakan kebijakan serta menerima kritik. Selain itu, transparansi dalam mengelola kegiatan

pembelajaran dan hubungan antara pimpinan, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat juga sangat penting.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang paradigma manajemen pendidikan Islam dalam tataran ideal dan realita. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta buku-buku utama yang membahas manajemen pendidikan Islam, dan sumber sekunder berupa artikel jurnal, prosiding seminar, serta laporan penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen yang berisi teori serta hasil penelitian terkait. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang melibatkan reduksi data, klasifikasi data berdasarkan konsep idealita dan realita dalam manajemen pendidikan Islam, serta interpretasi hubungan antara teori dan kenyataan di lapangan. Penelitian ini berangkat dari kerangka berpikir bahwa manajemen pendidikan Islam memiliki konsep ideal yang mengacu pada nilai-nilai Islam, namun terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Dengan menganalisis literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor penyebab kesenjangan antara idealita dan realita serta memberikan solusi konseptual untuk perbaikan sistem manajemen pendidikan Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Paradigma Manajemen Pendidikan Islam (MPI) menawarkan kerangka teoritis berbasis nilai-nilai Islam yang holistik. Paradigma tersebut tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga spiritual, sosial, dan kultural. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa antara idealita dan realita penerapan paradigma ini masih terdapat jurang yang lebar.

Paradigma Ideal MPI dalam Literatur menurut Mujamil Qomar (2007), MPI seharusnya dibangun berdasarkan empat paradigma utama:

1. Paradigma Tauhid.

Paradigma tauhid merupakan konsep fundamental dalam Islam yang menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan, harus berorientasi pada keesaan Allah SWT (wahdatul wujud). Dalam konteks manajemen pendidikan Islam (MPI), paradigma tauhid berarti bahwa setiap aktivitas pendidikan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus berlandaskan keyakinan bahwa ilmu adalah anugerah dari Allah dan pendidikan adalah bagian dari ibadah.

Menurut Al-Attas dalam bukunya *The Concept of Education in Islam*, paradigma tauhid dalam pendidikan menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang mengenal dan mengabdikan kepada Allah. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya bertujuan membentuk kecerdasan intelektual tetapi juga membangun kesadaran spiritual dan moral peserta didik. (Al-Attas, 1991)

Beberapa karakteristik utama paradigma tauhid dalam pendidikan Islam adalah: *Pertama* Menjadikan Allah sebagai pusat ilmu: Semua ilmu bersumber dari Allah SWT, sehingga proses pendidikan harus selalu dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiyah (QS. Al-Mujadilah: 11). *Kedua* Kesatuan antara ilmu dan amal: Ilmu yang dipelajari dalam pendidikan Islam tidak boleh berhenti sebagai teori, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari (QS. Al-Baqarah: 2). *Ketiga* Keseimbangan antara dunia dan akhirat: Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencetak profesional di dunia, tetapi juga individu yang sukses di akhirat (QS. Al-Qashash: 77). *Keempat* Membentuk akhlak yang mulia

Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak (HR. Al-Baihaqi), sehingga pendidikan Islam harus berorientasi pada pembentukan karakter mulia.

Dalam implementasinya, paradigma tauhid dalam MPI harus diterapkan dalam beberapa aspek berikut: *Pertama* Kurikulum Berbasis Tauhid: Pendidikan Islam harus mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kesatuan kurikulum yang berbasis tauhid. Model ini diterapkan di berbagai lembaga pendidikan Islam seperti International Islamic University Malaysia (IIUM), yang mengembangkan kurikulum berbasis Islamization of Knowledge.(Al-faruqi, 1982) *Kedua* Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Nilai Islam: Pemimpin lembaga pendidikan Islam harus meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW, yang mengedepankan amanah, keadilan, dan musyawarah dalam mengelola institusi pendidikan (QS. Asy-Syura: 38). *Ketiga* Sistem Evaluasi yang Holistik: Penilaian pendidikan dalam paradigma tauhid tidak hanya mengukur aspek kognitif (nilai akademik) tetapi juga akhlak dan spiritualitas peserta didik. Model evaluasi berbasis tarbiyah ruhiyah diterapkan di beberapa madrasah dan pesantren di Indonesia, sebagaimana dikaji oleh Zuhairini et al dalam Filsafat Pendidikan Islam.(Zuhairini, dkk, 2008)

Paradigma tauhid merupakan dasar utama dalam manajemen pendidikan Islam. Pendidikan yang berbasis tauhid tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran spiritual mereka. Agar paradigma ini dapat diterapkan secara optimal, perlu adanya integrasi kurikulum, kepemimpinan yang berbasis Islam, serta sistem evaluasi yang mencakup dimensi akhlak dan spiritualitas.

2. Paradigma Integralistik

Paradigma integralistik dalam pendidikan Islam adalah pendekatan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kesatuan sistem pendidikan yang holistik. Paradigma ini menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sekuler, yang selama ini menjadi tantangan utama dalam sistem pendidikan modern.

Menurut Al-Faruqi dalam bukunya Islamization of Knowledge, paradigma integralistik berupaya menjadikan ilmu sebagai bagian dari iman, di mana semua bidang ilmu dipelajari dalam bingkai nilai-nilai Islam.(Al-faruqi, 1982) Pendekatan ini juga didukung oleh Al-Attas dalam The Concept of Education in Islam, yang menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah menciptakan insan kamil (manusia sempurna) yang memiliki ilmu dan akhlak sekaligus.(Al-Attas, 1991)

Beberapa prinsip utama dalam paradigma integralistik adalah: *Pertama* Kesatuan antara Ilmu dan Agama: Pendidikan Islam harus mengajarkan bahwa ilmu berasal dari Allah SWT dan tidak boleh dipisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum (QS. Al-'Alaq: 1-5). *Kedua* Holisme dalam Pendidikan: Paradigma ini menekankan bahwa pendidikan harus membentuk manusia secara utuh (intelektual, spiritual, dan emosional), bukan hanya mencetak individu yang cerdas secara akademik. *Ketiga* Integrasi antara Teori dan Praktik: Pendidikan tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik kehidupan berbasis nilai-nilai Islam (QS. Al-Baqarah: 2). *Keempat* Pendekatan Interdisipliner: Semua disiplin ilmu (sains, sosial, ekonomi, teknologi) harus dikaitkan dengan ajaran Islam, sehingga peserta didik memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang hubungan antara ilmu dan nilai-nilai Islam.

Paradigma integralistik menekankan metode pengajaran yang tidak hanya berbasis teks (teoretis) tetapi juga kontekstual (praktis). Model ini diterapkan dalam pendekatan Tarbiyah Islamiyah yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung, seperti praktik ibadah, pengabdian masyarakat, dan penelitian berbasis Islam. Sistem penilaian dalam paradigma integralistik tidak hanya mengukur aspek kognitif (ujian akademik) tetapi juga mencakup aspek: Afektif (akhlak dan kepribadian), Psikomotorik (keterampilan praktis dalam kehidupan sehari-hari),Spiritual (ketaatan dalam ibadah dan hubungan sosial yang baik). Meskipun paradigma integralistik memiliki banyak keunggulan, masih ada

tantangan dalam penerapannya, seperti: Masih kuatnya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem pendidikan formal. Kurangnya tenaga pendidik yang memahami pendekatan integralistik sehingga masih banyak yang mengajar dengan metode konvensional. Kurikulum nasional yang masih memisahkan pendidikan agama dan pendidikan umum, membuat sulitnya penerapan model pendidikan berbasis integrasi ilmu.

Agar paradigma integralistik dapat diterapkan secara lebih luas, beberapa strategi dapat dilakukan: Reformasi Kurikulum: Pemerintah dan lembaga pendidikan Islam harus mulai menyusun kurikulum berbasis integrasi ilmu yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum dalam setiap mata pelajaran. Pelatihan Guru dan Tenaga Pendidik: Guru dan dosen harus diberikan pelatihan dalam pendekatan integralistik agar mampu mengajarkan ilmu dengan perspektif Islam. Peningkatan Penelitian tentang Islamisasi Ilmu: Perguruan tinggi Islam harus lebih banyak melakukan penelitian yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan Islam, sehingga menghasilkan teori dan metode pendidikan yang berbasis tauhid. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan Islam Internasional: Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan universitas Islam di luar negeri seperti Al-Azhar, IIUM, dan Qatar University, yang telah menerapkan sistem pendidikan integralistik.(Nasir, 2014)

Paradigma integralistik dalam pendidikan Islam bertujuan menghapus dikotomi ilmu dan menciptakan sistem pendidikan yang holistik, berbasis tauhid, dan membentuk manusia seutuhnya. Meskipun tantangan masih ada, dengan reformasi kurikulum, pelatihan guru, dan penelitian berbasis integrasi ilmu, paradigma ini dapat diimplementasikan secara lebih luas untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam.

3. Paradigma Transformatif

Paradigma transformatif dalam manajemen pendidikan Islam adalah pendekatan yang menempatkan pendidikan sebagai alat perubahan sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, beradab, dan berakhlak Islami. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter, memberdayakan umat, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut Freire dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed*, paradigma transformatif menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan manusia dari kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan.(Freire, 1970) Dalam konteks Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk individu yang bertanggung jawab secara sosial dan spiritual, sebagaimana dijelaskan Al-Faruqi dalam *Islamization of Knowledge*.(Al-faruqi, 1982)

Beberapa prinsip utama dalam paradigma transformatif adalah:

- 1) Pendidikan sebagai sarana perubahan sosial: Pendidikan Islam harus mampu mengatasi ketimpangan sosial, memberdayakan masyarakat, dan mendorong keadilan. Rasulullah SAW sendiri mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi umat yang beradab melalui pendidikan Islam (QS. Al-Mujadilah: 11).
- 2) Menanamkan kesadaran kritis: Pendidikan Islam harus mampu membuka wawasan peserta didik, sehingga mereka tidak hanya memahami ilmu secara pasif tetapi juga berpikir kritis terhadap permasalahan sosial (QS. Az-Zumar: 9).
- 3) Membangun karakter dan akhlak mulia: Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang memiliki akhlak yang baik, jujur, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar (QS. Al-Qalam: 4).
- 4) Pemberdayaan umat: Pendidikan Islam harus mampu membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan ketidakadilan dengan memberikan keterampilan, ilmu pengetahuan, dan peluang ekonomi berbasis syariah (QS. Al-Hashr: 7).

Lembaga pendidikan Islam harus menyusun kurikulum yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik tetapi juga membentuk jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan kepedulian sosial. Beberapa model yang sudah diterapkan antara lain: Pendidikan Berbasis

Kewirausahaan Islami di beberapa pesantren di Indonesia yang mengajarkan santri keterampilan ekonomi syariah. Pendidikan Sosial Islam yang diterapkan di Universitas Islam Negeri (UIN) dengan mengintegrasikan kajian keislaman dan isu sosial.

Paradigma transformatif menekankan metode pembelajaran yang aktif, dialogis, dan berbasis proyek sosial. Beberapa metode yang digunakan antara lain: Tafakur dan Tadabbur: Mengajak siswa untuk merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an dan menghubungkannya dengan kondisi sosial. Service Learning: Mengajak siswa untuk melakukan aksi sosial sebagai bagian dari pembelajaran. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning): Siswa diajak untuk menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat dengan pendekatan Islami. Evaluasi dalam paradigma transformatif tidak hanya mengukur nilai akademik tetapi juga mencakup: Akhlak dan kepedulian sosial peserta didik, Kemampuan berpikir kritis terhadap permasalahan sosial, Keaktifan dalam kegiatan sosial dan dakwah.

Pemimpin lembaga pendidikan Islam harus memiliki visi transformatif, yaitu: Menjadi agen perubahan yang mampu mendorong inovasi dalam pendidikan Islam. Membangun jaringan sosial dengan komunitas, pemerintah, dan dunia usaha untuk mendukung pendidikan Islam. Mengembangkan kebijakan berbasis maslahat umat. Paradigma transformatif dalam pendidikan Islam bertujuan menciptakan peserta didik yang tidak hanya berilmu tetapi juga menjadi agen perubahan sosial. Pendidikan dalam Islam harus mampu membentuk karakter, menumbuhkan kesadaran kritis, dan memberdayakan umat agar terhindar dari ketidakadilan dan keterbelakangan. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, dengan reformasi kurikulum, penguatan kapasitas guru, dan kemitraan dengan berbagai pihak, paradigma ini dapat dioptimalkan untuk menciptakan pendidikan Islam yang lebih progresif dan berdaya guna.

4. Paradigma Pembangunan Potensi

Paradigma pembangunan potensi dalam pendidikan Islam adalah pendekatan yang menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi fitrah yang diberikan oleh Allah SWT. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi tersebut secara optimal agar peserta didik dapat menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, setiap manusia memiliki bakat bawaan (fitrah) yang dapat berkembang dengan pendidikan yang tepat. (Khaldun, 1377) Konsep ini juga didukung oleh Al-Ghazali, yang menekankan bahwa pendidikan harus memperhatikan potensi akal, ruh, dan jasmani dalam proses pembelajaran. (Al-Ghazali, 1058)

Paradigma pembangunan potensi dalam pendidikan Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama: *Pertama* Setiap manusia memiliki potensi unik, *Kedua* Pendidikan sebagai sarana pengembangan fitrah, *Ketiga* Pembelajaran berbasis minat dan bakat, *Keempat* Keseimbangan antara akal, ruh, dan fisik. Paradigma pembangunan potensi dalam pendidikan Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi unik yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Dengan pendekatan yang berbasis minat, bakat, dan keseimbangan antara akal, ruh, dan jasmani, pendidikan Islam dapat menghasilkan individu yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan kehidupan.

Paradigma ini membentuk landasan filosofis dan praktis MPI yang bersumber dari nilai-nilai Qur'ani dan hadits Nabi SAW. Maka dari itu, keberhasilannya tidak hanya diukur dari output akademik, tetapi juga kualitas spiritual dan sosial peserta didik. (Qomar, 2007)

Realita Implementasi di lapangan, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MPI di banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih jauh dari paradigma ideal diantaranya Model Manajemen Konvensional: Penelitian oleh Jangcik Mohza dkk dalam Jurnal Pendidikan Tambusai mengungkapkan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam masih menggunakan pendekatan birokrasi lama. Keputusan manajerial bersifat sentralistik dan kurang partisipatif. Ini bertentangan dengan prinsip syura

(musyawarah) dalam Islam. (Jongcik dkk, 2023) Kurangnya Kompetensi SDM: Penelitian oleh Syamsul Hidayat dalam Jurnal Pilar Pendidikan menegaskan bahwa kepala sekolah dan guru masih banyak yang belum memiliki pelatihan formal dalam manajemen berbasis Islam. Bahkan, pemahaman terhadap nilai-nilai MPI masih terbatas pada teori, belum ke praktik manajerial. (S. Hidayat, 2023) Kurikulum Tidak Terintegrasi: Kurikulum di madrasah dan sekolah Islam banyak yang masih dikembangkan secara parsial. Mata pelajaran agama dipisahkan dari sains dan matematika, sehingga gagal membentuk wawasan integratif. Hal ini diidentifikasi dalam kajian Nurussalam dalam Jurnal Pendidikan Keislaman, yang menekankan perlunya kurikulum berbasis integrasi nilai dan ilmu. (Nurussalam, 2021) Evaluasi Berbasis Kognitif Saja: Evaluasi pendidikan masih dominan pada aspek kognitif. Penilaian afektif (akhlak, karakter) dan spiritual tidak dilakukan secara terstruktur dan terstandar. Hal ini bertentangan dengan prinsip takwiyatul akhlaq (penguatan akhlak) dalam pendidikan Islam. Fasilitas dan Pendanaan Terbatas: Banyak lembaga pendidikan Islam, khususnya di pedesaan atau yang bersifat swadaya, masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan anggaran. Ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan motivasi peserta didik.

Pendekatan Strategis: menjembatani ideal dan realita, untuk menjembatani jurang antara idealita dan realita, diperlukan pendekatan strategis yang mencakup beberapa aspek:

1. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah proses yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi seseorang agar dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal. Tujuannya adalah menciptakan individu yang produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun masyarakat umum. Menurut UNDP peningkatan kapasitas (capacity building) adalah proses pembangunan kemampuan individu, organisasi, dan sistem agar mampu menjalankan fungsi-fungsi penting secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. (UNDP, 1997) Sedangkan menurut Sondang P. Siagian pengembangan SDM merupakan upaya yang direncanakan untuk meningkatkan kompetensi dan potensi seseorang guna memenuhi tuntutan pekerjaan sekarang dan masa depan. (Siagian, 2002)

Bentuk-bentuk Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan dan pendidikan, memberikan pelatihan keterampilan teknis atau pendidikan lanjutan untuk meningkatkan kompetensi. (Werner, J. M, 2011) Pengembangan karier: memberi kesempatan kenaikan jabatan, rotasi kerja, atau tugas tambahan yang menantang. (Robbins, S. P, 2017) Pemberdayaan individu dan tim: meningkatkan kepercayaan diri, motivasi, dan tanggung jawab individu atau kelompok dalam organisasi. (Yuki, 2010) Peningkatan kualitas manajerial: melatih pemimpin atau manajer untuk menjadi visioner, komunikatif, dan inovatif. (Armstrong, 2020) Penguasaan teknologi informasi: memberi pelatihan digitalisasi dan keterampilan teknologi agar SDM mampu bersaing di era industri 4.0. (Schwab, 2017)

Tujuan Peningkatan Kapasitas SDM: Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, menciptakan SDM yang berkualitas dan profesional, menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, meningkatkan daya saing organisasi atau negara, mendorong inovasi dan kreativitas. Strategi Peningkatan Kapasitas SDM: Identifikasi kebutuhan pelatihan, penyusunan program pengembangan berkelanjutan, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, evaluasi berkala hasil pengembangan SDM. Peningkatan kapasitas SDM adalah investasi jangka panjang yang sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan suatu organisasi atau negara. Tanpa SDM yang berkualitas, kemajuan teknologi dan pembangunan tidak akan berjalan optimal.

2. Desentralisasi dan Kemandirian Lembaga

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan utama desentralisasi adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. (*Undang-Undang Republik Indonesia no 23 tentang Pemerintah Daerah*, 2014) Menurut Henry Maddick, desentralisasi adalah pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pejabat atau badan yang lebih rendah kedudukannya yang beroperasi dalam wilayah tertentu. (Maddick, 1963) Desentralisasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain: Desentralisasi politik: pelimpahan kekuasaan dalam proses politik, seperti pemilihan kepala daerah. Desentralisasi administratif: pelimpahan wewenang administratif dari pusat ke daerah. Desentralisasi fiskal: pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan. Desentralisasi ekonomi: pemberian ruang bagi daerah untuk mengelola potensi ekonominya sendiri. (Litvack, J, 1998)

Kemandirian lembaga mengacu pada kemampuan suatu institusi, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan, untuk menjalankan tugas dan fungsinya tanpa ketergantungan berlebih terhadap pihak luar. Lembaga yang mandiri memiliki kontrol atas sumber daya, kebijakan internal, dan mekanisme akuntabilitas sendiri. (Suryono, 2002) Kemandirian penting untuk menjamin profesionalitas, netralitas, dan efektivitas lembaga. Contohnya, kemandirian lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan fungsi pengawasan dapat dijalankan tanpa intervensi politik. (*Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laporan Tahunan KPK*, 2020) Desentralisasi yang efektif akan mendukung kemandirian lembaga di daerah. Ketika daerah diberikan kewenangan dan anggaran sendiri, maka institusi di daerah memiliki ruang untuk berkembang, menyusun kebijakan lokal, dan membangun sistem kelembagaan yang sesuai kebutuhan lokal. Namun, hal ini perlu diimbangi dengan sistem pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. (Rondinelli, 1981) Desentralisasi adalah alat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, sementara kemandirian lembaga adalah syarat agar pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan efektif. Keduanya saling terkait dan mendukung dalam membentuk sistem pemerintahan yang demokratis, efisien, dan akuntabel.

3. Pengembangan Kurikulum Integratif

Kurikulum integratif adalah model kurikulum yang menyatukan berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan, dan bermakna. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang menyeluruh (holistik) kepada peserta didik, serta menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. (Fogarty, 1991) Menurut Beane kurikulum integratif menekankan pada pendekatan lintas disiplin (interdisipliner) yang dikembangkan berdasarkan isu atau tema kehidupan yang relevan bagi peserta didik. (Beane, 1997) Ciri-ciri Kurikulum Integratif: Tematik – pembelajaran berbasis tema atau isu. Keterkaitan antar mata pelajaran – tidak belajar satu mata pelajaran secara terpisah. Keterpaduan nilai – menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual secara menyatu. Berpusat pada peserta didik – menyesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman siswa. Kontekstual – mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. (Drake, 1998) Tujuan Pengembangan Kurikulum Integratif: Menyediakan pembelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan nyata. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Mendorong kolaborasi dan pemecahan masalah. Menanamkan nilai-nilai moral dan karakter yang terintegrasi dalam proses belajar. (Jacobs, 1989)

Langkah-langkah Pengembangan Kurikulum Integratif diantaranya *Pertama* Identifikasi kebutuhan peserta didik: Melibatkan analisis konteks sosial, budaya, dan lingkungan sekitar. *Kedua* Penentuan tema sentral: Tema dipilih dari isu yang dekat dengan kehidupan peserta didik (misalnya: lingkungan, teknologi, etika). *Ketiga* Pemilihan kompetensi dasar lintas mapel: Mengambil KD dari berbagai mapel yang relevan dengan

tema. *Keempat* Pengembangan kegiatan pembelajaran terpadu: Menyusun RPP atau modul pembelajaran yang terintegrasi antar mata pelajaran. *Kelima* Evaluasi hasil belajar: Evaluasi dilakukan secara holistik, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. (Majid, 2008) Pengembangan kurikulum integratif merupakan salah satu pendekatan penting dalam dunia pendidikan modern, yang bertujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga tangguh secara moral dan sosial. Dengan pendekatan ini, pendidikan menjadi lebih bermakna dan kontekstual.

4. Inovasi Evaluasi Islami

Evaluasi Islami adalah proses penilaian terhadap hasil belajar peserta didik yang tidak hanya menilai aspek kognitif (pengetahuan), tetapi juga mencakup aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (perilaku), serta spiritualitas berdasarkan nilai-nilai Islam. (Muhaimin, 2004) Tujuan utama evaluasi islami adalah membentuk insan kamilah (manusia paripurna) yang tidak hanya cerdas intelektual, tapi juga memiliki akhlak mulia dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah SWT. (Zuhairini, dkk, 1991) Ciri-ciri Evaluasi Islami diantaranya Berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis: Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan ajaran Islam, seperti kejujuran, disiplin, adab belajar, dan akhlak. Menyeluruh dan terpadu (integratif): Menilai aspek ruhiyah (spiritual), aqliyah (intelektual), dan jasadiyah (fisik/amal). Menggunakan pendekatan humanis dan ilahiyah: Evaluasi dilakukan dengan cara yang tidak menyudutkan, tapi mendorong refleksi diri dan perbaikan akhlak. (Abudin, 2012) Tujuan bukan sekadar angka, tapi pembinaan karakter islami: Siswa dinilai tidak hanya dari nilai ujian, tapi juga keistikamahan dalam ibadah, kejujuran, dan kontribusi sosial.

Beberapa bentuk inovasi evaluasi islami di antaranya:

a. Portofolio Karakter

Evaluasi dilakukan berdasarkan kumpulan aktivitas siswa yang menunjukkan akhlak dan perilaku baik, seperti kehadiran salat berjamaah, jurnal ibadah harian, sedekah, dan proyek amal. (Syahidin, 2011)

b. Self Assessment Islami

Siswa menilai diri sendiri berdasarkan indikator akhlak Islami, seperti kesabaran, kejujuran, dan kepedulian sosial. Guru memverifikasi dengan observasi dan dialog spiritual.

c. Peer Assessment Akhlak

Teman sebaya ikut menilai sikap dan adab sesama teman dengan pedoman Islami, misalnya adab berbicara, tolong-menolong, dan amanah.

d. Evaluasi Spiritual Harian

Catatan ibadah siswa dijadikan salah satu komponen penilaian, seperti salat lima waktu, membaca Al-Qur'an, dan adab kepada guru. (A. Hidayat, 2019)

e. Penggunaan Teknologi Digital Islami

Penggunaan aplikasi atau platform evaluasi berbasis nilai Islam, seperti e-portofolio akhlak atau kuis interaktif berbasis kisah Nabi dan hadis.

Tujuan Inovasi Evaluasi Islami: Mendorong pembinaan karakter yang seimbang antara ilmu dan iman. Menghilangkan penilaian yang hanya fokus pada nilai ujian. Mengembangkan pendidikan ruhaniyah dan adab siswa. Menjadikan evaluasi sebagai sarana tarbiyah (pembinaan), bukan hanya seleksi (Mulyasa, 2013) Inovasi evaluasi islami bukan hanya soal metode baru, tetapi lebih kepada penekanan nilai-nilai Islam dalam menilai keberhasilan belajar siswa. Evaluasi bukan lagi sekadar alat ukur akademik, tapi menjadi sarana pendidikan akhlak, ibadah, dan kepribadian Islami. Dengan begitu, tujuan pendidikan Islam untuk membentuk manusia paripurna bisa tercapai lebih optimal.

5. Kemitraan dan Kolaborasi

Kemitraan (partnership) adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan, dengan prinsip saling percaya, saling

Islamic Knowledge and Pedagogical Perspectives

Volume 1 Number 1 Januari (2025), ISSN: XXXX-XXXX

menghargai, dan saling melengkapi. Dalam konteks pendidikan, kemitraan mencakup kerja sama antara sekolah dengan pihak luar seperti orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah/non-pemerintah. Menurut Brinkerhoff kemitraan adalah hubungan yang dibentuk atas dasar kesetaraan, keterbukaan, dan kontribusi bersama dalam mencapai tujuan tertentu.(Brinkerhoff, 2002)

Kolaborasi (collaboration) adalah proses kerja sama antara individu atau kelompok untuk mencapai hasil yang tidak bisa dicapai secara individu. Kolaborasi menekankan pada keterlibatan aktif semua pihak, komunikasi efektif, dan pengambilan keputusan secara bersama.(Little, 1990) Menurut Friend & Cook kolaborasi adalah gaya interaksi antarmanusia yang ditandai dengan komitmen untuk bekerja bersama menuju tujuan yang sama dengan saling berbagi tanggung jawab.(Friend, M, 2010) Manfaat Kemitraan dan Kolaborasi yaitu, Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja: Dengan membagi sumber daya dan keahlian, hasil kerja lebih optimal.(Huxham, C, 2005) Memperluas jaringan dan pengaruh: Dapat menjangkau lebih banyak pihak, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan sosial: Dalam dunia pendidikan, kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat mendorong keberhasilan siswa. Mendukung inovasi dan pemecahan masalah: berbagai sudut pandang memperkaya solusi dan strategi.

Perbedaan Kemitraan dan Kolaborasi

Aspek	Kemitraan	Kolaborasi
Tujuan	Saling mengutamakan	Pencapaian tujuan bersama
Hubungan	Formal, bisa kontraktual	Bisa formal atau informal
Keterlibatan	Bertahap, sesuai kepentingan	Aktif dan setara sepanjang proses
Fokus	Hasil atau output	Proses dan hasil

Prinsip-prinsip Kemitraan dan Kolaborasi yang Efektif: Saling percaya dan transparansi, komunikasi terbuka, tujuan yang disepakati bersama, komitmen dan tanggung jawab bersama, evaluasi dan refleksi bersama.(Himmelman, 2001) Kemitraan dan kolaborasi adalah dua pendekatan penting dalam membangun kerja sama yang produktif. Dalam dunia pendidikan, sosial, dan pembangunan masyarakat, keduanya menjadi kunci sukses dalam menciptakan perubahan yang berdampak luas. Hubungan yang dibangun bukan hanya soal kerja sama, tetapi juga soal nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, dan tujuan yang mulia.

Paradigma Manajemen Pendidikan Islam antara: Idealita dan Realita

No	Aspek	Idealita (Harapan)	Realita (Kenyataan)
1	Kurikulum	Berbasis tauhid, integratif antara ilmu agama dan umum	Masih terpisah antara ilmu agama dan ilmu umum
2	Metode Pembelajaran	Aktif, partisipatif, berbasis proyek dan pemecahan masalah	Masih dominan metode ceramah dan hafalan
3	Peran Guru/Ustadz	Sebagai fasilitator, mentor, dan inspirator	Masih banyak yang hanya sebagai pemberi materi
4	Tujuan Pendidikan	Membentuk insan kamil (berakhlak, berilmu, dan berdaya)	Masih berorientasi pada pencapaian akademik semata

KESIMPULAN

Paradigma manajemen pendidikan Islam antara idealita dan realita menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal yang diharapkan dan kondisi yang terjadi di lapangan. Secara ideal, manajemen pendidikan Islam seharusnya berbasis tauhid, integratif, profesional, serta mampu menghasilkan individu yang memiliki keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Kurikulum yang diterapkan seharusnya holistik, berbasis fitrah, serta mampu mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan seharusnya aktif, inovatif, dan berbasis pemecahan masalah, dengan guru yang berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam membentuk karakter Islami. Namun, dalam realitasnya, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi manajemen pendidikan Islam. Beberapa di antaranya adalah kurikulum yang masih terpisah antara ilmu agama dan ilmu umum, metode pembelajaran yang masih cenderung konvensional, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya kesejahteraan guru. Selain itu, masih terdapat masalah dalam aspek manajemen lembaga pendidikan yang belum sepenuhnya profesional serta kurangnya keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam mendukung pendidikan Islam.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan berbagai upaya perbaikan, seperti reformasi kurikulum yang lebih integratif, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam, serta penguatan pendanaan berbasis wakaf dan zakat pendidikan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat, idealita manajemen pendidikan Islam dapat semakin mendekati realitas, sehingga dapat mencetak generasi Muslim yang unggul dalam ilmu, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Bibliography

- Al-Faruqi, I., R. (2012). *Islamic Linguistics and Qur'anic Interpretation*. 15(3).
- Al-Ghazali. (1058). *Ihya Ulumuddin*.
- Armstrong, M. (2020). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice (15th ed)*.
- Beane, J., A. (1997). *Curriculum Integration: Designing the Core of Democratic Education*.
- Brinkerhoff, J., M. (2002). Government-Nonprofit Partnership: A Defining Framework. *Administration and Development*, 22(1).
- Didi, et al., S. (2024). Kajian Filsafat Manajemen Pendidikan Islam: Parodeks dan Teori. *Sada Kurnia Pustaka*.
- Drake, S., M. (1998). *Creating Integrated Curriculum: Proven Ways to Increase Student Learning*.
- Fatah, N. (2000). *Manajemen Berbasis Sekolah, Strategi Pemberdayaan Sekolah dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Kemadirian*.
- Fogarty, R. (1991). *The Mindful School: How to Intagrate the Curricula*.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*.
- Friend, M., cook, l &. (2010). *Interactions: CollaborationSkills for School Professionals*.
- Hahnson, et.al, R. A. (1983). *The Theory and Management of System*.
- Hasan, S. (2023). Tantangan dan Strategi Manajemen Pendidikan Islam dalam Menghadapi Era Disrupsi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9(1).
- Hidayah, et al., N. (2022). Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Manajemen Pendidikan Islam di Era Modern. *Jurnal Pendidikan Islam*, 18(3).
- Hidayat, A. (2019). Pengembangan Instrumen Evaluasi Karakter Islami pada Pendidikan Dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1).
- Hidayat, S. (2023). Efektivitas Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Pilar Pendidikan*, 4(2).
- Himmelman, A., T. (2001). On Coalitions and the Transformation of Power Relations: Collaborative Betterment and Collaborative Empowerment. *American Journal of Community Psychology*, 29(2).
- Huxham, C., vangen, S&. (2005). *Managing to Collaborate: Th Theory and Practice of Collaborative Advantage*.
- Jacobs, H., H. (1989). *Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation*.
- James H., D. (1984). *Fundamentals of Management*.
- John M. Echlos, H. shadiily dan. (1993). *Kamus Inggris indonesia*.
- Jongcik dkk, M. (2023). Eksistensi dan Paradigma Keilmuwan Manajemen Pendidikan islamm. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3).
- Jongcik, et al., M. (2023). Eksistensi dan paradigma keilmuwan Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2).
<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.6870>.
- Khaldun, I. (1377). *Muqaddimah, Bairut: Dar al-Fikr*.
- Khojir, K. (2011). Membangun Paradigma Ilmu Pendidikan Islam: Kajian ontologi, Epistemologi. *JURNAL UIN ALAUDDIN MAKASSAR*, 11(1).
<https://doi.org/10.21093/di.v11i1.51>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laporan Tahunan KPK. (2020).

Islamic Knowledge and Pedagogical Perspectives
Volume 1 Number 1 Januari (2025), ISSN: XXXX-XXXX

- Little, J., W. (1990). *The Persistence of Privacy: Autonomy and Initiative in Teachers' Professional Relations*. 91(4).
- Litvack, J. A. J. & B., R. (1998). *Rethinking Decentralization in Developing Countries*.
- Maddick, H. (1963). *Democracy, Decentralisation and Development*.
- Made, P. (1982). *Management Pendidikan di Indonesia*.
- Majid, A. (2008). *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*.
- Muhaimin. (2004). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Menyusun Epistemologi Pendidikan Islam*.
- Mukhtar, dkk. (2003). *Sekolah Berprestasi*.
- Mulyasa E. (2003). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*.
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*.
- Nasir, M. (2014). *Pendidikan Islam Integral: Konsep dan Implementasi*.
- Nurussalam. (2021). Pendekatan dan Tantangan Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Keislaman*, 9(1).
- Qaradhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.
- Qomar, M. (2007). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mencari Format Pendidikan Ideal*.
- Qomar, M. (2021). *Paradigma Manajemen Pendidikan Islam*. BINTANGPUSNAS.
- Rahman, T. (1999). *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-al-Qur'an*.
- Ramayulis. (2004). Ilmu pendidikan Islam. *Kalam Mulia*.
- Robbins, S. P, J., T. A. &. (2017). *Organizational Behavior (17th ed)*.
- Rondinelli, D., A. (1981). *Government Decentralization in Comparative Perspective (Vol. 47)*.
- Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*.
- Siagian, S. P. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Suryono, A. (2002). Kemandirian Lembaga Publik: Tinjauan dari Perspektif Manajemen Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(1).
- Syafaruddin. (2005). *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*,.
- Syahidin. (2011). *Evaluasi Pendidikan Islam dalam Perspektif Holistik*.
- Syarifudin, M. Pd. (2005). *Pengelolaan Madrasah (Pendekatan Teoritis dan Praktis)*.
- Umedi. (1999). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*,.
- Undang-Undang Republik Indonesia no 23 tentang Pemerintah Daerah. (2014).
- UNDP. (1997). *Capacity Development: Technical Advisory paper 2*.
- Uwes, S. (2003). *Visi dan Pondasi Pendidikan (Dalam Perspektif Islam)*,.
- Walter M., M. (2004). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Efisien*. UNESCO.
- Wardi, M. (2014). Problematika Pendidikan Islam dan Solusi Alternatifnya (perspektif ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis). *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/tjpi.v8i1.383>
- Werner, J. M, D., R. L. &. (2011). *Human Resource Development (6th ed)*.
- Wirakartakusumah, A. (1998). *Pengertian mutu dalam pendidikan*.
- Yuki, G. (2010). *Leadership in Organizations (7th ed)*.
- Yusuf Udaya, A. M. K. dan. (1996). *Pengantar Ilmu Manajemen*.

Islamic Knowledge and Pedagogical Perspectives
Volume 1 Number 1 Januari (2025), ISSN: XXXX-XXXX

- Zainuddin. (2020). Pendidikan Islam: Antara Realitas dan Cita-cita.". *IAIN LANGSA JOURNALS*, 13(1). <https://doi.org/10.32505/at.v13i1.1653>.
- Zuhairini, dkk. (1991). *Filsafat Pendidikan Islam*.
- Zuhairini, dkk. (2008). *Filsafat Pendidikan Islam*.